TINGKAT EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) ORANG PRIBADI DAN BADAN SERTA KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK PERIODE TAHUN 2020-2022

Oleh

Lutfiah Khairunisa¹, Endro Andayani², Fifi Arifianti³

^{1,2,3}Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Email: ²endoandayani@gmail.com

Article History:

Received: 15-10-2023

Revised: 23-10-2023

Accepted: 19-11-2023

Keywords:

Efektivitas Penerimaan PPh,

Kepatuhan Laporan SPT,

KPP Pratama Tanjung Priok

Abstract: Tujuan penulisan ini untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Dan Kepatuhan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok Periode Tahun 2020 - 2022. Dasar hukumnya UU dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan. Metode pengamatan yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan kualitatif berdasarkan studi dokumen dan wawancara dan informan. Berdasarkan hasil pengamatan penulis, Tingkat efektivitas penerimaan pajak PPh mengalami kenaikan pada periode 2020-2022 dengan rata-rata sangat efektif, sedangkan tingkat prosentase kepatuhan laporan SPT Badan pada tahun 2022 penurunan, jika di rata-rata 80,33 % atau tinggi, Untuk SPT Orang Pribadi Pada tahun 2021 mengalami penurunan, jika dirata-rata 62,67% atau kurang. Saran untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priok untuk meningkatkan pengawasan dan sosialisasi dalam pelaporan SPT

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pembayaran yang harus dilakukan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada pemerintah untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Wajib Pajak tidak memperoleh manfaat langsung dari pajak yang dibayar karena pajak tersebut untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi. Pajak sebagai sumber dana pembangunan bagi pemerintah, yang mana dalam jangka panjang masyarakat umum dapat menikmatinya.

Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, hal ini berdasarkan data realisasi pendapatan negara tahun 2020-2022 dari Badan Pusat Statistik (<https://www.jstax.co.id/jenis-penerimaan-negara>). Pemungutan pajak atas dasar undang-undang, dan bersifat memaksa, sehingga tidak membayar pajak atau penghindaran pajak biasanya dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hal itu diperlukan peran

aktif otoritas pajak dan kemauan wajib pajak. Kesiapan dan kesadaran untuk membayar pajak menunjukkan nilai yang bersedia diberikan seseorang (menurut undang-undang) untuk membiayai pengeluaran negara tanpa subsidi langsung. Pengeluaran sektor publik yang besar menuntut pemerintah meningkatkan penerimaannya, salah satunya berasal dari penerimaan pajak.

Tanggung Jawab wajib pajak adalah menghitung, mencatat, dan melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) ini harus akurat, lengkap dan jelas sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk orang pribadi disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan badan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT. Sejak tahun 2005 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi yaitu e-System atau Electronic System. Sistem elektronik administrasi perpajakan meliputi e-Registration, e-Filing, e-SPT, dan e-Billing. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan meningkat.

Dalam Rangka meningkatkan penerimaan pajak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak, KPP Pratama Jakarta Tanjung Priuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat pada sektor pajak, seperti ikut serta dalam membantu pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara, salah satunya dengan memperhatikan rencana penerimaan pajak dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT disetiap tahunnya.

Berikut ini gambaran KPP Pratama Jakarta Tanjung Priuk yang memiliki target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan pada tabel 1 dan jumlah target dan realisasi pelaporan SPT tahunan Badan dan Orang Pribadi pada tabel 2 untuk periode tahun 2020 sampai tahun 2022, dimana Pada tahun 2020 Target penerimaan pajak penghasilan tidak tercapai dan tahun 2020 sampai dengan 2022 Target pelaporan SPT Pajak Penghasilan tidak tercapai sebagai berikut :

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priuk Periode 2020-2022

Tahun	Target	Realisasi
Tahun 2020	1.152.638.382.000	952.768.993.002
Tahun 2021	2.943.428.478.000	3.003.029.141.851
Tahun 2022	3.279.023.941.000	4.056.217.878.908

Sumber :KPP Pratama Tanjung Priuk

Tabel 2.Target dan Realisasi Pelaporan SPT Orang Pribadi dan Badan KPP Pratama Jakarta Jakarta Tanjung Priuk Periode 2020-2022

JENIS SPT	TAHUN		
	2020	2021	2022
REALISASI PENYAMPAIAN SPT			
BADAN	1.878	5.819	6.032

ORANG PRIBADI	12.839	43.157	47.372
TARGET			
BADAN	1.832	5.860	6.064
OP	18.753	53.200	53.200

Sumber :KPP Pratama Tanjung Priuk

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak pada saat pelemahan ekonomi global sebagai akibat adanya covid 19 dan pasca pemulihan serta dampak pengenalan sistem perpajakan modern khususnya pelaporan e-SPT PPh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perumusan Masalah

Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) dan tingkat persentase kepatuhan laporan SPT Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanjung Priuk periode tahun 2020-2022

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Definisi pajak, Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". sedangkan menurut Frida (2020:7) yaitu: "Pajak adalah unsur penting bagi tiap negara. Semakin banyak orang yang membayar pajak, maka akan semakin banyak juga fasilitas dan infrastruktur yang dibangun oleh negara"

2. Fungsi Pajak

Menurut Narwanti (2018: 30)

Ada empat fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak digunakan pemerintah sebagai sumber dana dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara

b. Fungsi Pengaturan (*Regulered*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Fungsi stabilitas

Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas kondisi dan keadaan ekonomi negara. seperti stabilitas nilai tukar dan stabilitas moneter.

d. fungsi Redistribusi pendapatan

Pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan yang tinggi kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih rendah.

3. Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan

yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. SPT.

Menurut Mardiasmo (2019:40-46) mengemukakan: Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

5. Efektivitas

Pengertian dan penjelasan teori efektivitas dari berbagai sumber adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan hasil dengan Target. Efektifitas merupakan hubungan antara Hasil dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.
- b. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi , Rumus (Pratama et al., 2022) sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

Tabel 3 Nilai Interpretasi Efektivitas Presentase (%)

Persentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
70-80	Kurang Efektif
<70	Tidak EFEKTIF

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690900327 tahun 1996

6. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan (Hasanudin et al., 2020)

Rumus dan klasifikasi rasio perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak (Yasin & Mila Safitri, 2021) adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$\text{Tingkat kepatuhan} = \frac{\text{Jumlah SPT terlapor}}{\text{Wp terdaftar}} \times 100\%$$

Klasifikasi rasio perhitungan:

Tabel 4. Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan	Skor
90-100%	Sangat Tinggi
80-89%	Tinggi
65-79%	Cukup
55-64%	Kurang
0-54%	Rendah

Sumber: Wayan Nurkencana dan Sunartana (1983: 80)

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, menurut Sugiyono (2019:25), definisi pendekatan kualitatif yaitu: "Penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme* atau *enterpretif* untuk meneliti objek yang alamiah", melalui pengamatan di lapangan dalam rangka penggalian data yang diperlukan agar dapat mengetahui berapakah efektivitas penerimaan pajak dan kepatuhan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi dan Badan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok. Teknik Pengambilan Data atau Informasi melalui studi dokumen dan wawancara dengan *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Tanjung Priok

HASIL

Penulis melakukan observasi dan wawancara di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan Bapak Arwin Yudha Kristyawan jabatan *Account Representative* untuk mendapatkan informasi yang lebih informatif mengenai masalah yang diangkat penulis, selama penulis melakukan kegiatan observasi selama kurang lebih satu bulan dari Februari hingga Maret 2023. Efektivitas penerimaan pajak dilihat realisasi dengan target dan Indikator kepatuhan pajak yang digunakan adalah indikator formal yaitu yang menyampaikan laporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT), berikut tingkat efektivitas penerimaan pajak periode 2020-2022 di KPP Tanjung Priok :

1. Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan Tabel 4 Pada tahun 2020 efektivitas penerimaan PPh sebesar 83% dikriteriakan cukup efektif, target tidak tercapai dikarenakan adanya covid 19, pada tahun 2021 sebesar 102% dikriteriakan sangat efektif, dan pada tahun 2022 sebesar 128% dikriteriakan sangat efektif. Sehingga rata-rata rasio efektivitas penerimaan PPh dari tahun 2020-2022 sebesar 104% termasuk kriteria sangat efektif, karena rasio di atas 100%

Tabel 5. Target Dan Realisasi Penerimaan PPh

Tahun	Target (1)	Realisasi (2)	Tingkat efektivitas (2/1 x100%)	Keterangan
2020	1.152.638.382.000	952.768.993.002	83%	Cukup Efektif
2021	2.943.428.478.000	3.003.029.141.851	102%	Sangat Efektif
2022	3.279.023.941.000	4.056.217.878.908	128%	Sangat Efektif
Rata-Rata			104%	Sangat Efektif

Sumber : Olahan Penulis

2. Tingkat Persentase Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok periode 2020 sampai dengan 2022

Dari hasil pengamatan yang disajikan pada tabel 6, maka berdasarkan olahan penulis, pembahasan mengenai Prosentase penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2020-2022, sebagai berikut:

a) Tahun 2020

Tingkat prosentase yang menyampaikan SPT Badan adalah 1.878 dibagi 3.869 dikali 100% hasilnya adalah 74% atau cukup, sedangkan SPT OP realisasi 12.839 dibagi 20.253 dikali 100% sama dengan 63% atau kurang

b) Tahun 2021

Tingkat prosentase yang menyampaikan SPT Badan adalah sejumlah 5.819 dibagi 6.730 dikali 100% adalah 86% atau Tinggi, sedang Wajib Pajak OP adalah 43.157 dibagi 72.637 dikali 100% hasilnya sebesar 59% atau Kurang.

c) Tahun 2022

Tingkat prosentase yang menyampaikan SPT Badan adalah sejumlah 6.032 dibagi 7.763 dikali 100% adalah 81% atau Tinggi, sedang Wajib Pajak OP adalah 47.372 dibagi 71.490 dikali 100% hasilnya sebesar 66% atau cukup.

Tabel 6. Realisasi SPT Badan Dan OP Tahun 2020-2022

Jenis SPT	Tahun		
	2020	2021	2022
Realisasi Penyampaian Laporan SPT			
Badan	1.878	5.819	6.032
Orang Pribadi	12.839	43.157	47.372
Detail Jumlah Wajib Pajak Aktif Dan Efektif			
WP Aktif	24.122	79.367	79.253
Badan	3.869	6.730	7.763
OP	20.253	72.637	71.490
WP Tidak Efektif	74.723	144.009	142.819
Badan	1.445	2.707	2.745
OP	73.278	141.302	140.074
Presentase (Realisasi/Jumlah WP Aktif) x 100%			
Badan	74%	86%	81%
Skor	Cukup	Tinggi	Tinggi
OP	63%	59%	66%
Skor	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber: Olahan Penulis

Dengan demikian maka, apabila dilihat dari prosentase dari total jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibagi dengan Wajib Pajak aktif Badan dan Orang Pribadi terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahun pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2022. Untuk Wajib Pajak Badan Pada tahun 2020 sebesar 74% atau Cukup, tahun 2021 naik menjadi sebesar 86% atau tinggi, dan tahun 2022 turun menjadi sebesar 81% atau tinggi, dengan rata-rata 80,33% atau tinggi, Sedangkan Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pada tahun 2020 sebesar 63% atau kurang ,

tahun 2021 turun menjadi sebesar 59% atau kurang, dan tahun 2022 naik menjadi sebesar 66% atau cukup, rata-rata 62,67% atau Kurang. Tingkat kepatuhan badan dan orang pribadi pada tahun 2020 dan 2022 masih dibawah 100%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan yang diuraikan sebeumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan dan Orang Pribadi naik setiap tahun pada tahun 2020 sampai tahun 2022 . Tahun 2020 cukup efektif dengan presentase 83%, tahun 2021 sangat efektif dengan presentase 102 % , dan tahun 2022 sangat efektif dengan presentase 128 %.
2. Tingkat kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dalam melaporkan SPT mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Pada tahun 2020 tingkat kepatuhan wajib pajak badan sebesar 74% atau cukup, sedangkan di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 86% atau tinggi, tetapi di tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 81% atau tinggi. Sedangkan untuk wajib pajak orang pribadi tahun 2020 63% atau kurang, tahun 2021 menurun menjadi 59% atau kurang dan tahun 2022 naik menjadi 66% atau Cukup.

SARAN

1. Ditingkatkan terus kinerjanya agar dapat mempertahankan dan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok
2. Ditingkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT, dan sosialisasi secara intensif

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- [2] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 perubahan keenam atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- [3] Direktur Jenderal Pajak. 2019. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan.
- [4] Frida, Catharina Vista Okta. 2020. Hukum Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Garudhawaca.
- [5] Narwanti, Sri. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Istana Medi
- [6] Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :
- [7] Alfabet.
- [8] Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- [9] Pratama, P., Tahun, B., Nordiansyah, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Lambung, U. (2022). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANJARMASIN TAHUN 2019-2021 Nur Auliah Rahmini (Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat). *Jurnal*

Referensi Ulasan Perpajakan, 3(1).

- [10] Yasin, M., & Mila Safitri. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak (Wp) Dalam Melaporkan Spt Tahunan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Mataram Barat. *Jurnal Aplikasi Perpajakan, 2(1)*, 1-22. <https://doi.org/10.29303/jap.v2i1.11>